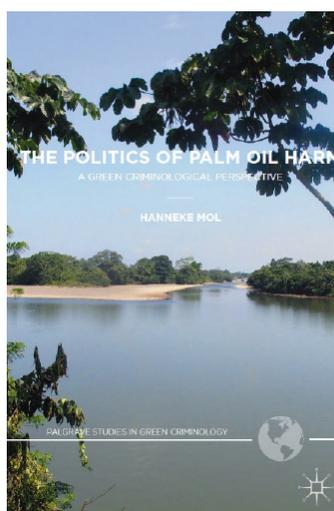


[Tinjauan Buku]

Menimbang Kejahatan Industri Kelapa Sawit Kolombia

Azinuddin Ikram Hakim, Manggiasih Tilotama Tunjung Biru

Youth Studies Centre Fisipol UGM



Judul Buku	: The Politics of Palm Oil Harm: A Green Criminological Perspective
Pengarang	: Hanneke Mol
Penerbit	: Palgrave Macmillan
Tahun	: 2017
ISBN	: 978-3-319-55378-8

PENDAHULUAN

Buku bertajuk *The Politics of Palm Oil Harm: A Green Criminological Perspective* ini bercerita tentang kultur pemanfaatan minyak kelapa sawit di Kolombia. Buku ini ditulis oleh Hanneke Mol pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Palgrave Studies in Green Criminology. Hanneke Mol adalah seorang kriminolog yang telah lama berkecimpung tentang isu sosial dan kerusakan lingkungan. Mol kerap kali menunjukkan kewaspadaan tentang praktek-praktek politik di dalam pemanfaatan lingkungan karena di dalam beberapa kasus hal itu mengarah pada praktek-praktek kriminalitas.

Kolombia dan industri kelapa sawit memiliki keterikatan yang tidak dapat dilepaskan. Di Kolombia, komoditas kelapa sawit tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan agroindustri namun juga menyasar ke berbagai lini kehidupan. Sebagaimana diung-

kapkan oleh Bozzi (dikutip oleh Mol 2017), bahwa industri kelapa sawit juga merupakan sejarah, budaya, dan janji kesejahteraan yang menyatu dalam masyarakat, tanah dan pembangunan. Tidak heran bahwa Kolombia merupakan negara ke-5 dengan industri kelapa sawit terbesar di dunia, dan yang pertama di Amerika Selatan. (Henson, dkk 2011).

Dilematis dan Citra Industri Kelapa Sawit

Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang turut menjelaskan bagaimana penggunaan minyak kelapa sawit telah membudaya secara massif di Kolombia. Mol (2017) memulai dengan narasi dilematis tentang pengolahan industri kelapa sawit, di satu sisi minyak kelapa sawit memiliki peran yang krusial terhadap segala kebutuhan global, seperti permintaan bahan makanan, pendukung harga, dan menstimulasi pengembangan desa. Praktik tersebut telah menjadi

sumber kehidupan dan sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah pembangunan industri. Namun di sisi lain, industri kelapa sawit juga merupakan ancaman bagi ekologi dan sosial budaya.

Ketika memulai terjun ke lapangan di Kolombia, Mol menginvestigasi konfrontasi yang terjadi di antara pro industri kelapa sawit, melawan pihak yang kontra dan kritis seperti komunitas lokal serta NGO yang mendukung. Hal ini semakin kompleks ketika posisi pro dan kontra ini mengalami konflik secara terus-menerus.

Dalam beberapa contoh seperti kasus di Mira River, setiap hari limbah minyak turun dan mencemari sungai mereka, ketika air sungai terkontaminasi racun dari limbah kemudian berimplikasi bagi sumber kehidupan dan segala ekosistem yang bersangkutan dengan sungai. Di Uraba Chocoano, industri kelapa sawit tumbuh secara sistematis dengan adanya kasus persekusi kekerasan terhadap warga lokal.

Kriminalisasi lingkungan berupa kekerasan dan pemaksaan merupakan manifestasi dari kekuasaan produksi industri kelapa sawit. Di sisi lain, terdapat juga kasus perampasan dan perebutan tanah yang sama rumitnya. Mol menelusuri jejak-jejak kriminalisasi dan kekerasan dengan perspektif kriminologi, hal ini untuk melihat siapa saja yang terlibat menjadi korban. Mol membaginya dalam tiga bagian, pertama dari sudut pandang keadilan lingkungan, analisis yang utama mengacu pada konsekuensi terhadap manusia, seperti pergeseran aktivitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Kedua yakni keadilan ekologi yang menekankan pada dampak kejahatan lingkungan dan kerusakan lingkungan alam, seperti hancurnya tatanan habitat alam, deforestasi, erosi, perubahan iklim karena efek hilangnya hutan, dan tandus. Analisis ketiga menekankan keadilan makhluk hidup/spesies, sebagaimana kerusakan lingkungan itu berimplikasi pada kelangsungan hidup hewan, seperti adanya kekerasan pada hewan dan hilangnya habitat asli hewan. Ketiganya memiliki potensi konflik yang dapat membahayakan segala

lini kehidupan.

Berangkat dari bukti-bukti kriminalisasi, Mol melacak kepentingan kekuasaan yang kuat dibalik industri kelapa sawit. Kekuasaan tersebut seolah mengesahkan segala cara untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah mengeksploitasi lingkungan dan membenarkan tindakan kriminalitas. Buku ini menjelaskan kekuasaan di dalam politik industri kelapa sawit Kolombia. Mol menggunakan perspektif ekonomi politik dalam membaca *Green Criminological* yang mengacu pada eksploitasi alam. Mol juga menekankan pada teori kekerasan, kekuasaan, dan legalitas di balik kepentingan politis industri kelapa sawit. Implikasi dari permainan kekuasaan adalah ketegangan konflik. Dalam ketegangan tersebut terdapat ketidakadilan, perdebatan tentang legalitas, dan bentuk kolonialitas baru terhadap tanah.

Green Criminology: Tradisi Kritis Melihat Eksploitasi Lingkungan

Green Criminology adalah tradisi kritis dalam menginterogasi kekuasaan yang bersangkutan dengan sosioekologi, yang menjelaskan tentang pola kejahatan dan kerusakan lingkungan. Bahwa ada kesanggupan dari kelompok yang kuat untuk memanipulasi lingkungan berbasis kekuasaan mereka. Perspektif tersebut dipertimbangkan dengan ekonomi politik yang menyangkut politik global karena struktur ekonomi, relasi, regulasi hukum, dan refleksi terhadap reproduksi kekuasaan pada era kapitalisme modern (Stretesky, dikutip oleh Mol 2017). Analisis ini menunjukkan kejahatan dengan kekuasaan, dimana ada kepentingan ekonomi secara eksplisit.

Perdebatan tentang legal atau tidak legal dari praktik perusakan lingkungan juga erat kaitannya dengan relasi kuasa. Mol membaca bahwa pendirian industri secara legalitas dipertanyakan oleh oknum-oknum yang memegang kendali kuasa. Michalowsky (dikutip dari Mol, 2017) memaparkan bahwa mayoritas kajian kriminologi selalu berkaitan dengan korporat,

politik, negara yang bisa mencengkeram asas formal 'legalitas', dimana dilindungi oleh hukum, seolah memberikan legitimasi dalam bentuk kriminalisasi. Lebih lanjut, Michalowski menjelaskan bahwa permasalahan dapat terjadi karena adanya kekuasaan yang dominan di dalam formasi hukum dan konstitusi sosial. Kekuasaan dibalik posisi antara legal dan illegal juga menimbulkan ketidaksetaraan dan kekuasaan yang tidak seimbang terhadap akses tanah, penggunaan, otoritas bahkan pada tataran sosial, sosialekologi, dan relasi ekonomi.

Mol mengungkapkan bahwa alih lahan menjadi lahan sawit secara eksploitatif terjadi berawal dari privatisasi oleh negara. Tanah kolektif dan adat di pesisir pantai disebut sebagai *tierra baldia* yang berarti tanah milik negara. Klaim tersebut mencerabut nilai sejarah dan adat dari tanah yang merupakan kawasan hutan lidung di pesisir pantai. Klaim tersebut dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap daerah pesisir pantai, namun National Indigenous Organization of Columbia mengatakan bahwa perlindungan hanya untuk eksploitasi di kemudian hari dengan cara deforestasi yang ternyata secara hukum dianggap legal. Melalui Aliansi Strategis Petani Kecil Kelapa Sawit mengkritisi model produksi tersebut menghambat pelaksanaan otonomi budaya, teritorial, dan ekonomi, serta mereka mempertanyakan apa, bagaimana dan untuk siapa kebijakan ini dibentuk? Mereka mengkritisi hal tersebut dikarenakan model subsisten dan konsep kepemilikan tanah yang mereka miliki dilemahkan.

Dalam kasus tersebut, penanaman sawit dilakukan secara eksploitatif dalam artian terjadi pemaksaan perubahan budaya tanam dari para petani sekitar. Lahan yang tadinya diklaim milik negara kemudian dikontrol sepenuhnya oleh swasta. Dengan mengatasnamakan modernisasi untuk daerah tidak berpenghuni, terpencil dan jauh dari peradaban, pihak swasta kemudian mengembangkan lahan sawit disana dan mengabaikan kultur hidup warga setempat. Menariknya, perubahan budaya tanam yang

tadinya multikultur melalui kesepakatan berubah menjadi monokultur berupa sawit. Penanaman ini terkesan tanpa paksaan karena melalui jalur kesepakatan. Namun, mengubah budaya tanam juga turut mengubah cara hidup warga setempat.

Para pendukung produksi minyak sawit pada akhirnya mengembangkan lahan sawit dengan prinsip mengembangkan wilayah yang terbelakang, berawal dari anggapan bahwa komunitas lokal tidak mampu memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Ketika gagasan seperti itu memiliki kesempatan untuk direalisasikan, akhirnya deforestasi memiliki karakter yang cenderung merugikan masyarakat lokal dan kelangsungan hidupnya. Dengan melihat risiko tersebut, maka pihak industri sawit diminta untuk bertanggungjawab lebih dari lahan yang diakuinya. Mol menemukan bahwa 60% lahan yang digunakan untuk menanam sawit di Tumaco adalah hutan primer. Mol membagi dampak dari deforestasi antara lain merupakan dampak kerusakan keanekaragaman hayati dari budidaya sawit. Hewan-hewan yang banyak secara fisik tidak layak hidup dibunuh, sisanya bermigrasi keluar mencari ekosistem yang lebih sehat. Hal tersebut menurut aktivis Afro-Kolombia yang melakukan pengamatan di daerah perkotaan Tumaco bahwa perkebunan sawit telah hancur sekaligus tidak dapat mempertahankan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Proses alih lahan untuk perkebunan sawit di Tumaco ini sangat beragam, dari yang legal hingga ilegal, dari bentuk paksaan dan kekerasan secara langsung hingga paksaan dan kekerasan secara tidak langsung yang merupakan bentuk dari kekuasaan yang lebih konsensual. Mol menyebutkan ada tiga pengaruh kuat dalam ekspansi agroindustri di Tumaco. Di antaranya adalah klasifikasi tanah-tanah di Kolombia Pasifik sebagai *tierra baldia*, penggambaran wilayah serta populasinya sebagai wilayah yang marjinal maupun terbelakang, serta imajinasi

perbatasan sebagai ruang yang tidak dikelola secara hukum, sehingga ilegalitas mampu berkuasa. Sedangkan, dari sudut pandang pengembang agroindustri sawit justru berpendapat bahwa deforestasi maupun budidaya sawit merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan wilayah dan masyarakatnya, serta untuk mengurangi kerusakan sosial dan lingkungan. Sebaliknya, masyarakat terdampak dan LSM yang melihat lahan sawit dari sudut pandang kritis memandang deforestasi sebagai kerusakan lingkungan. Masyarakat terdampak tidak lagi peduli terhadap legalitas dari deforestasi, bagi mereka sudah sangat jelas bahwa ada kerusakan sosial, budaya dan ekologis yang diakibatkan oleh pengembangan budidaya sawit.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pengurangan cadangan hutan tidak dilakukan secara ilegal karena berada di bawah batasan hukum. Sehingga yang perlu dipertanyakan dalam tiap kebijakan mengenai pemanfaatan lingkungan adalah bagaimana proses pembuatan hukumnya? Kepada siapa hukum tersebut berpihak? Hukum menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, karena ia mengatur urusan antar manusia dan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang tersedia. Jika hukum memberikan kesempatan bagi eksploitasi, maka tindak kejahatan bisa dikatakan legal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat yang terdampak terhadap perampasan tanah tidak hanya merasakan dampak bagi kepemilikan tanah itu saja, melainkan juga cara hidup yang berhubungan dengan tanah. Dalam kritik green criminology yang digarisbawahi bukan urusan manusia dengan manusia, melainkan kondisi alam dan kondisi sosial, termasuk budaya yang lahir dari konteks ekologis. Mol menjelaskan bahwa yang terjadi tidak hanya perusakan lahan atau pelanggaran hak, melainkan juga diskriminasi budaya minoritas dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Dengan logika kolonialisme, korporasi kelapa sawit menawarkan diri sebagai juru selamat bagi masyarakat yang dianggap terbelakang. Mol sedang mengajak

para pembaca bahwa sesungguhnya eksploitasi lahan menjadi perkebunan sawit tidak hanya merupakan praktek pelanggaran hukum, namun juga praktek menghilangkan masyarakat lokal beserta adat dan sejarahnya yang dianggap menghambat perkembangan perusahaan sawit.

Selain melihat dampak sosial dan budaya dari agroindustri sawit, Mol juga menjelaskan dampak secara ekosistem dari pengembangan budidaya sawit. Dari hasil pengamatannya, ia menemukan bahwa karakter sosial dan ekologis dari industri kelapa sawit tidak sesuai dengan sosioekologis dan ekonomi petani lokal di Tumaco. Ditemukannya penyakit Busuk Pucuk Kelapa (BPK) menunjukkan bahwa model agroindustri minyak kelapa sawit tidak sesuai dengan sifat biofisik dan dinamika ekologi ekosistem lokal. Selain mewawancarai kritikus minyak kelapa sawit, Mol juga mewawancarai petani kecil terdampak untuk menunjukkan bagaimana penyakit ini telah membawa kerusakan sosial dan lingkungan bagi wilayah tersebut. Berkaitan dengan kerusakan alam yang terus berlanjut, Mol mengkaitkannya dengan konfigurasi politik dan ekonomi yang timpang. Secara teori, konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan dan negara bisa lebih terbuka terhadap konsep alternatif tentang pembangunan dan hubungan antara manusia dengan lingkungan, namun kenyataannya gagasan yang hegemonic selalu lebih diakui. Akibatnya, kerusakan sosial dan lingkungan terus berlanjut dan semakin sulit bagi masyarakat untuk menyesuaikan cara hidup mereka dengan cara hidup yang didikte oleh konsep pembangunan neoliberal dan tekanan hidup untuk lebih produktif sesuai dengan kriteria kapitalis.

Mol juga menekankan bahwa cara hidup manusia pada dasarnya mengikuti kondisi ekologis di sekitarnya. Antar-kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki cara hidup yang berbeda. Sehingga hukum, ekonomi serta rasionalitas yang dianut oleh pelaku korporasi dan perwakilan industri sebagian besar tidak sesuai dengan praktik sosial setempat,

kondisi lingkungan, serta budaya yang dianut. Mengingat adanya subordinasi sosial, budaya dan lingkungan, Mol mengusulkan jalan tengah antara masyarakat lokal dengan tradisi dan akar historisnya dengan pihak korporasi, yaitu untuk memeriksa kerangka hukum yang diperluas dengan “multikulturalisme neoliberal” (Hale, dikutip oleh Mol 2017). Dengan “multikulturalisme neoliberal”, hukum dan kerangka kerja politik tidak dibentuk untuk menentang atau mengubah konfigurasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang telah ada, melainkan sebagai bentuk pengakuan budaya yang diarahkan untuk pembentukan kembali sosial dan budaya politik dan kondisi ekonomi serta hubungan semua elemen dalam masyarakat. Buku ini berusaha berargumentasi dengan sudut pandang politik, bahwa kekuasaan itu bergerak dalam dua dimensi, pertama dimensi diskursus tentang konsep kerusakan tersebut diartikulasikan, dipahami, dikonstruksi sebagai strategi, dan yang kedua yakni dimensi *practical* yakni menekankan pada keaktualitasan kasus yang tengah terjadi, yang dalam industri kelapa sawit berkaitan dengan praktik, relasi sosial, dan interaksi manusia-lingkungan, memperhatikan aspek *ground practice* di dalam kontestasi produksi industri kelapa sawit. Tidak luput, buku ini juga melihat bagaimana akumulasi kapital mampu mencederai budaya dari kaum minoritas yang masih menjunjung nilai adat, namun dianggap terbelakang.

Sawit di Indonesia dan Ketenagakerjaan Pemuda

Penulisan buku ini telah menggugah dunia internasional. Narasi tentang Kolombia dengan segala lini kehidupan industri kelapa sawit dengan lantang Hanneke Mol suarakan. Tentu, buku ini membawa refleksi tersendiri bagi bangsa Indonesia, negara dengan industri kelapa sawit terbesar di dunia. Muhammad Yusuf dalam artikelnya yang berjudul Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan (2013) menjelaskan bagaimana alih lahan untuk agroindustri salah satunya sawit di Indonesia juga menuai

perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro agroindustri sawit mengatasnamakan pengurangan kemiskinan melalui tiga mekanisme, yakni penciptaan lapangan kerja tenaga upahan, peluang bisnis bagi pertanian kontrak, dan pembayaran sewa serta pembelian tanah. Sedangkan, argumen tersebut dibantah oleh pihak yang kontra dengan alasan bahwa alih lahan untuk agroindustri sawit hanya merupakan upaya melepaskan petani dari lahannya dan tidak mampu terserap dalam sistem di agroindustri tersebut.

Yusuf mengungkapkan bahwa akuisisi lahan untuk sawit dilakukan dengan dua cara, secara vertikal oleh swasta dan negara melalui perantara negara, atau secara horizontal dengan sesama petani. Sedangkan, dari total perkebunan sawit, 61% dikuasai oleh negara dan 39% dikuasai oleh rumah tangga petani. Menjawab logika pengentasan kemiskinan yang diajukan oleh kelompok pro agroindustri sawit, Yusuf menjelaskan bahwa yang terjadi di Indonesia, terutama di kawasan Kalimantan Selatan menunjukkan kegagalan agroindustri sawit dalam memajukan masyarakat di daerah tersebut. Kegagalan terjadi karena petani kehilangan akses terhadap alat produksi, yaitu tanah. Petani yang tinggal di sekitar perkebunan sawit juga tidak terserap sebagai tenaga kerja upahan.

Di daerah yang diteliti oleh Yusuf yaitu di desa Hayup dan desa Tajau Pecah, mayoritas penduduknya adalah transmigran. Ketika sudah mencapai di generasi anak dan para generasi anak ini mampu menempuh pendidikan tinggi, ketika ia kembali ke desa tenaganya juga tidak terserap oleh industri, karena adanya logika *lazy native* dari para pengembang perusahaan. Dengan adanya perkebunan sawit, yang terjadi bukan kesejahteraan untuk masyarakat setempat, namun justru penyingkiran masyarakat setempat, termasuk generasi berikutnya, yaitu pemuda karena kemampuannya dianggap tidak masuk kualifikasi untuk bekerja di industri.

Merefleksikan dari ulasan di atas, maka kita bisa melihat penting bagi pemuda untuk turut

sadar dalam pemeliharaan lingkungan, tidak hanya untuk kelestarian ekosistem, tapi juga kelestarian cara hidup masyarakat di sekitar ekosistem tersebut, dan meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang mencederai kalangan marjinal. Pemuda juga harus menyadari bahwa *green criminology* bukan hanya mengenai pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran cara hidup yang tidak diatur dalam hukum. Kesadaran perlu dibangun untuk membangun lingkungan yang berkelanjutan, sehingga bisa mengelola risiko-risiko di masa depan bagi generasinya maupun generasi setelahnya. Tentunya, buku ini adalah media bercermin bagi sesama bangsa yang memiliki komoditas industri kelapa sawit. Konteks sosial-politik di balik industri tersebut merupakan tantangan sekaligus refleksi bagi pemuda-pemuda khususnya di Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mol, Hanneke. 2017. *The Politics of Palm Oil Harm: A Green Criminological Perspective*. UK: Palgrave McMillan.
- Henson, Ian, Rodrigo R Romero, Hernan M Romero. 2011. "The Growth of the Oil Palm Industry in Colombia". *Journal of Oil Palm Research*, Vol. 23, pp 1121-1128.
- Yusuf, Muhammad. 2013. "Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan". *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 2, No. 1, pp 45-62.